

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Prilaku Pemilih

Para ahli ilmu politik menyebutkan bahwa tingkah laku individu dalam pemungutan suara pada kegiatan pemilu disebut dengan konsep perilaku pemilih (*voting behavior*). Harold F. Gosnell(1934. Hlm 287) memberikan batasan sebagai berikut: “Pemungutan suara adalah proses dimana seseorang anggota masyarakat dari suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan dengan demikian ikut serta dalam menentukan konsensus diantara anggota -anggota kelompok itu dalam pemilihan seorang pejabat maupun keputusan yang diusulkan. Dengan demikian, konsep voting berkaitan dengan pemberian suara dari seorang individu dalam rangka ikut berpartisipasi dalam politik”. Secara sederhana *voting behavior* bisa didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum melalui serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y. Menurut Affan Gaffar (1992. Hlm. 4-9), “dalam menganalisis *voting behavior* dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan oleh para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya, dikenal dua macam pendekatan, yaitu Mazhab Columbia yang menggunakan pendekatan sosiologis dan mazhabMichigan yang dikenal dengan pendekatan psikologis”. Selain itu terdapat pula pendekatan rational choice yang melihat perilaku seseorang melalui kalkulasi untung rugi yang didapatkan oleh orang tersebut.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis berasal dari Eropa Barat yang dikembangkan oleh ahli ilmu politik dan sosiologi. Mereka memandang bahwa masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat hirarkis terutama berdasarkan status, karena masyarakat secara keseluruhan merupakan kelompok orang yang mempunyai kesadaran status yang kuat. Para pendukung mazhab ini percaya bahwa masyarakat telah tersusun sedemikian rupa sesuai dengan latar belakang dan karakteristik sosialnya, maka memahami karakteristik sosial tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam memahami perilaku politik individu. Secara singkat, aliran yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam menganalisis *voting behavior* ini menyatakan bahwa preferensi politik termasuk preferensi pemberian suara di kotak pemilihan seseorang merupakan produk dari karakteristik sosial ekonomi di mana dia berada seperti profesi, kelas sosial, agama dan seterusnya. Dengan kata lain, latar belakang seseorang atau sekelompok orang atas dasar jenis kelamin, kelas sosial, ras, etnik, agama, pekerjaan, ideologi bahkan daerah asal menjadi independent variabel terhadap keputusannya untuk memberikan suara pada saat pemilihan. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal, seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok okupasi dan sebagainya. Maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku pemilih. Hal ini dikarenakan kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh terhadap pembentukan sikap dan orientasi seseorang.

Menurut August Campbell (1976. Hlm 475) Secara umum, karakteristik sosial menjadi dasar bagi tindakan kelompok dalam melakukan partisipasi tertentu mamperlihatkan hubungan yang lebih berarti dengan hasil suara dan bebarapa aspek partisipasi politik. Karakteristik sosial tersebut menurut Afan Gaffar (1992. Hlm. 4-9) “dikategorikan kedalam beberapa indikator yaitu: pendidikan, Jabatan/

pekerjaan, jenis kelamin, Usia”. Menurut Afan Gafar (1992. Hlm. 4-9), Seymour Martin Lipset yang juga pelopor dari pendekatan sosiologis memberikan perhatiannya pada karakteristik sosial terutama status dan pekerjaan dalam memahami perilaku pemilih. Bagi Lipset, pemilu tidak lain adalah suatu cara untuk mengekspresikan perjuangan kelas, karena partai adalah dasar utama dari kelas bawah, kelas menengah ataupun kelas atas”.

3. Pendekatan Psikologis

Munculnya pendekatan psikologis merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan partisipasi politik. Menurut pendekatan psikologis, para pemilih (di AS) menentukan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologi yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Pendekatan psikologis berasumsi bahwa keputusan seorang individu dalam memberikan suara kepada kandidat tertentu merupakan persoalan respons psikologis. Pendekatan psikologis mensyaratkan adanya kecerdasan dan rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya. Pada pendekatan psikologis penekanan lebih pada individu itu sendiri. Menurut pendekatan sosial psikologis, ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku memilih. Tiga faktor tersebut adalah identifikasi partai, orientasi isu atau tema dan orientasi kandidat. Identifikasi partai yang dimaksud disini adalah bukan sekedar partai apa yang dipilih tetapi juga tingkat identifikasi individu terhadap partai tersebut (misalnya lemah hingga kuat). Menurut Philip Converse yang dikutip oleh Afan Gaffar (1992. Hlm. 10), mengartikan ”identifikasi partai sebagai keyakinan yang diperoleh dari orang tua dimasa muda dan dalam banyak kasus, keyakinan tersebut tetap membekas sepanjang hidup, walaupun semakin kuat atau memudar selama masa dewasa”.

Lalu yang dimaksud dengan orientasi isu atau tema adalah tema atau isu-isu apa saja yang diangkat oleh parpol tersebut. Sedangkan, yang dimaksud orientasi kandidat adalah siapa yang mewakili parpol tersebut. Menurut pendekatan sosial psikologis, tiga faktor itulah (identifikasi partai, orientasi tema dan orientasi kandidat) yang akan menentukan perilaku memilih.

4. Pendekatan Rasional

Intisari teori pilihan rasional (*rational choice theory*) adalah bahwa “ketika dihadapkan pada beberapa jenis tindakan, orang biasanya melakukan apa yang mereka yakini berkemungkinan memberikan hasil yang terbaik” (Elster 1998a: 22). Pilihan rasional muncul sebagai bagian revolusi behavioral dalam ilmu politik Amerika tahun 1950an dan 1960an yang sebenarnya berusaha meneliti bagaimana individu berperilaku dan menggunakan metode empiris. Dia telah menjadi pendekatan dominan terhadap ilmu politik, setidaknya di AS. Namun “pilihan rasional bersumber dari metodologi ilmu ekonomi, berkebalikan dengan para behavioralis yang bersumber dari sosiologi dan psikologi” (David Marsh dan Gaerry Stoker, 2002. Hlm.76-77). Kemudian Seiring perkembangannya, muncul pendekatan *rational choice* dalam menganalisa perilaku pemilih, Berdasarkan pendekatan ini, manusia diasumsikan adalah seorang pemilih yang rasional. Kegiatan memilih merupakan produk dari kalkulasi untung rugi, Individu mengantisipasi setiap konsekuensi yang mungkin muncul dari pilihan-pilihan yang ada. Lalu, dari pilihan-pilihan tersebut, individu akan memilih pilihan yang memberi keuntungan paling besar bagi dirinya.

Menurut Asep Ridwan (2004. Hlm.38-39) “Dalam pendekatan rasional terdapat dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan : apa yang seharusnya dilakukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara? Sementara orientasi kandidat mengacu kepada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya. Meski

demikian, ketertarikan para pemilih terhadap isu-isu yang ditawarkan oleh partai ataupun kandidat bersifat situasional”. “Pendekatan rasional mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap visi, misi, program kerja partai dan kandidat. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan ataupun kebiasaan, dan tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri, melainkan juga untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangannya yang logis”.

Dalam studi perilaku pemilih, konsep orientasi tidak hanya sekedar orientasi isu dan orientasi kandidat. Konsep orientasi itu sendiri menurut Almond dan Verba mengacu pada aspek-aspek dan obyek yang dibakukan serta hubungan antar keduanya, termasuk :

- a. “Orientasi Kognitif : Pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outpunya. Dalam studi perilaku pemilih, konsep orientasi tidak hanya sekedar orientasi isu dan orientasi kandidat. Konsep orientasi itu sendiri menurut Almond dan Verba mengacu pada aspek-aspek dan obyek yang dibakukan serta hubungan antar keduanya, termasuk :
- b. Orientasi afektif: Perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya,
- c. Orientasi evaluatif: Keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standart nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan” (Gabriel A. Almond dan Sidney Verba,1984, Hlm.16).

Gitelson, Dudley, dan Dubnick dalam buku mereka yang berjudul “American Goverment”(1996. Hlm.207-209) menyebutkan, bahwa yang mempengaruhi pemilih Amerika dalam menentukan pilihannya adalah :

- a. Isu yang concern terhadap permasalahan lokal, nasional, dan negara. Misalnya pada pemilu 1992, masyarakat lebih memilih

Clinton karena isu negara dan ekonomi yang dibawanya serta isu pengurusan, kriminal, obat-obatan terlarang, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan.

- b. Image kandidat, yaitu kandidat yang ditampilkan harus berkualitas dan mempunyai pengalaman dalam kepemimpinan. Selain itu bagaimana seorang kandidat harus menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang jujur, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat, yang hal ini biasa disebut para analis sebagai analisis psikologi.
- c. Identifikasi partai, yaitu keyakinan terhadap suatu partai, walaupun pemilih tidak mengetahui tentang kandidat yang dicalonkan, namun label partai menjadi keyakinan bagi pemilih.
- d. Tinjauan kembali para pemilih, yaitu keadaan ketika para pemilih meninjau kinerja masa lalu suatu partai. Artinya pemilih meninjau track record untuk memprediksikan masa depan.
- e. Dukungan kelompok, bentuk dukungan kelompok dicontohkan dengan dukungan para intelektual kepada Clinton. Selain itu, kelompok-kelompok seperti orang-orang miskin, katolik, liberal, dan serikat buruh juga mendukung Clinton. Artinya, secara tidak langsung, suatu kelompok tertentu dengan dukungan terhadap kandidat tertentu, maka anggota dari kelompok tersebut akan mendukung kandidat yang didukung oleh kelompoknya.

Lebih lanjut, Muhamad Asfar dalam bukunya yang berjudul "Pemilu dan Perilaku Pemilih" (2006. Hlm 137) mengklasifikasikan pemilih kedalam tiga jenis, yaitu :

- a. Pemilih Rasional

Pemilih dalam hal ini menutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dengan tawaran program yang diberikan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih rasional memiliki ciri khas yaitu tidak begitu mementingkan ikatan ideologi suatu partai politik atau calon yang

diusungnya. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan telah dilakukan oleh suatu partai maupun calon yang diusungnya.

b. Pemilih kritis

Untuk menjadi pemilih kritis, seseorang melalui dua hal yaitu, pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai mana ataupun kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau telah dilakukan. Kedua bisa terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dahulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan pemilu, baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara ideologi partai dengan kebijakan yang akan dibuat.

c. Pemilih Tradisional

Jenis pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih jenis ini sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Pemilih jenis ini sangat mudah untuk dimobilisasi selama masa kampanye, dan mereka memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang caleg maupun partai politik merupakan kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

d. Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi terhadap sebuah partai politik, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal yang penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang, hasilnya

akan sama saja dan tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terjadi bagidaerah maupun negara ini.

5. Pengertian Pendidikan

Dari beberapa teori diatas yang menjelaskan mengenai orientasi pemilih dalam menjatuhkan pilihannya, maka dapat kita lihat bahwa semua pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pemilih dalam menjatuhkan pilihannya tidak terlepas dari aspek pendidikan. Bahwa pendekatan-pendekatan seperti pendekatan sosiologis, psikologis maupun pilihan rasional memiliki keterkaitan dengan latar belakang pendidikan seseorang. Taufik Abdullah (1987. Hlm 327.) menyebutkan bahwa “pendidikan merupakan usaha untuk membina kepribadian dan kemampuan seseorang, baik itu kemampuan jasmani dan rohani yang dilakukan dalam rumah tangga, sekolah, dan dalam masyarakat agar dengan kemampuan tersebut dapat mempertahankan, mengembangkan kelangsungan hidup masyarakat”.

Pendidikan didapatkan tidak terbatas hanya dari sekolah-sekolah formal saja, melainkan dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga pula. Hal tersebut diuraikan oleh S. Sudarmi (LP3ES. Hlm 45), dimana pendidikan memiliki tiga bentuk yaitu :

- a. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang kita kenal dengan pendidikan di sekolah yang diatur bertingkat dengan syarat-syarat yang jelas.
- b. Pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang teratur dan sadar tetapi tidak perlu mengikuti aturan yang ketat dan tetap.
- c. Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dengan pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak lahir sampai mati, didalam pergaulan sehari-hari. Uraian dari S. Sudarmi tersebut, lebih lanjut lagi dapat dijabarkan bahwa pendidikan formal merupakan suatu aktivitas yang terorganisir , diatur bertingkat, dan dengan syarat-syarat yang jelas untuk mengembangkan pengetahuan dan kepribadian seseorang yang diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal seperti SD,

SLTP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan non formal juga bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan seseorang dalam bidang tertentu dan membangun kepribadian, namun tidak perlu mengikuti aturan yang ketat dan tetap, dimana pendidikan seperti ini didapatkan melalui kursus-kursus dalam hal tertentu. Lain pula halnya dengan pendidikan informal yang dapat dijelaskan sebagai proses yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberikan hasil yang berpengaruh kepada pembangunan pengetahuan, dan kepribadian seseorang yang didapatkan melalui pergaulan, maupun pengalaman sehari-hari.

Dalam hubungannya dengan perilaku pemilih, Samuel J. Dan Eldersvelt (1982. Hlm 338-339) menyatakan bahwa “masyarakat yang pendidikannya rendah memiliki motivasi yang rendah pula dalam memilih”. Hal ini diperkuat oleh Thomas E. Canavaugh bahwa “seseorang dengan tingkat pendidikan sekolah dasar memiliki motivasi yang rendah dalam memilih (motivasi memilih hanya 59%), seseorang dengan tingkat pendidikan sekolah menengah memiliki motivasi sebesar 72%, dan seseorang yang pendidikannya sarjana memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam memilih yaitu sebesar 85%”. menurut Bernard R. Berelson dkk (1984. Hlm 212-214.), “masyarakat yang demokratis haruslah mengetahui dengan baik mengenai kondisi perpolitikan disekitarnya, isu apa yang sedang berkembang, bagaimana sejarahnya, keterhubungannya dengan fakta yang terjadi, untuk apa suatu partai politik didirikan dan apa pengaruh dari hadirnya partai politik tersebut”. Disinilah pendidikan dibutuhkan, pendidikan dibutuhkan bagi pemilih untuk melihat situasi politik yang ada, menilai kampanye yang dilakukan suatu partai politik, sehingga ia dapat menentukan pilihannya secara rasional. Berbeda dengan masyarakat yang berpendidikan rendah sehingga cenderung memilih berdasarkan ikatan emosional kepada kandidat, partai maupun social group tertentu. Maka dalam penelitian ini, penulis mengasumsikan bahwa pendidikan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang, dimana pendidikan merupakan faktor penting sebagai alat untuk membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap seorang calon anggota legislatif maupun suatu partai politik sehingga pada akhirnya orang tersebut dapat menentukan pilihannya.

B. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/Tahun : Muhammad Farid Salman Alfarisi RM/2014

Judul : Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2009

Tempat Penelitian : Kota Banda Aceh

Pendekatan & Analisis : Metode deskriptif kuantitatif, penelitian yang dimaksud untuk mengetahui hubungan antar variable, dan analisa secara kuantitatif dengan menampilkan tabel dan kemudian dideskripsikan.

Hasil Penelitian :

1. Kelurahan Kopelma Darussalam merupakan suatu lokasi yang terletak di Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam dan merupakan suatu kelurahan dengan tingkat pendidikan penduduknya yang tergolong kedalam menengah keatas. Hal ini disebabkan karena Kopelma Darussalam sendiri dikenal sebagai komplek pelajar dan mahasiswa sehingga penduduknya mayoritas berpendidikan menengah keatas.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis penulis dapat diterima. Melalui hasil pengolahan data, ditemukan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dengan perilaku pemilih.
3. Penduduk yang berpendidikan tinggi akan memiliki motivasi yang tinggi pula dalam memilih, serta memiliki minat yang tinggi terhadap politik. Dengan minat yang tinggi ini, seseorang akan menyadari bahwa memilih adalah hak seorang warga negara dan dilaksanakan tidak dengan paksaan dari pihak lain. Motivasi dan minat yang tinggi ini akan berimplikasi kepada tingginya keinginan untuk memperoleh informasi seputar pemilu dan Caleg/ Partai Politik yang akan mengikuti pemilu, dimana informasi tersebut meliputi visi dan misi, track record, maupun identitas seorang Caleg/ Partai politik tertentu.
4. Penduduk yang berpendidikan tinggi akan memiliki cukup informasi mengenai pemilu dan Caleg/ Partai Politik yang akan dipilihnya sehingga membawa mereka kepada pilihan yang rasional, yaitu pilihan yang

didasari dengan pertimbangan seperti visi/misi dan track record calon, bukan sekedar pilihan secara emosional saja.

5. Penduduk dengan tingkat pendidikan menengah kebawah cenderung memiliki minat dan keingintahuan yang rendah pula terhadap politik. Hal ini membawa mereka kepada sikap yang apatis. Memilih didalam pemilihan umum mereka lakukan berdasarkan ajakan orang lain dan bukan karena kesadaran akan hak sebagai warga negara.
6. Pendidikan penduduk yang tergolong kedalam tingkatan menengah kebawah menyebabkan rendahnya motivasi untuk memperoleh informasi mengenai Caleg/ Partai Politik yang akan mereka pilih. Minimnya perolehan informasi tersebut menyebabkan semakin semakin rendah pula rasionalitas mereka dalam memilih. Artinya pilihan hanya dilakukan berdasarkan kedekatan, kharisma, bahkan dapat dimobilisasi dengan pemberian sejumlah materi.
7. Responden dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat dikategorikan kedalam jenis pemilih rasional dan kritis yaitu pemilih yang melakukan penilaian yang valid terhadap visi-misi, dan track record calon serta mampu melakukan analisis ideologis mengenai kebijakan yang akan dibuat nantinya melalui ideologi yang diusung seorang Caleg/ Partai Politik tertentu.
8. Responden yang berpendidikan menengah kebawah dapat dikategorikan kedalam jenis pemilih tradisional dan skeptis, dimana pilihan mereka didasarkan pada unsur-unsur kharisma dan kedekatan sarta tidak mementingkan analisis kebijakan dan hanya memilih secara random/ acak saja.

Persamaan :

1. Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi, akibat dari adanya variabel bebas. adalah “**Pengaruh tingkat pendidikan**”.

Perbedaan :

1. Tahun Penelitian.

2. Judul Penelitian.
3. empat Penelitian.

C. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pemikiran

rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dimana rakyat mempunyai hak untuk ikut serta dalam proses pemerintahan dan berhak menentukan siapa saja yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijakan umum. Keikutsertaan rakyat dalam proses pemerintahan diwujudkan melalui adanya penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi dalam menentukan wakil-wakilnya baik yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Perwujudan pemilu juga sebagai sarana bagi rakyat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

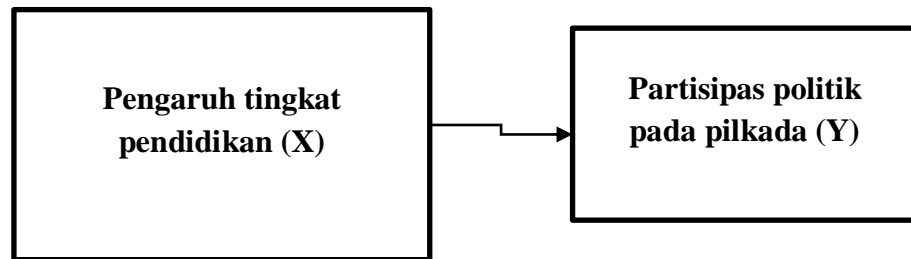
Selama ini pemilu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling demokratis dalam membentuk suatu pemerintahan yang baik. Melalui

pemilu yang jujur, adil, dan bebas, secara langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi penggantian elit pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang telah disepakati bersama.

2. Skema Diagram

Yang menjadi Variabel bebas (Variabel X) pengaruh tingkat pendidikan.

Variable dependen atau variable terikat (Y) terhadap perilaku pemilih pada pilkada.



D. Asumsi dan Hipotesa

1. Asumsi

Asumsi adalah titik tolak penelitian yang digunakan sebagai dasar penelitian secara umum. Arikunto (2002:58) mengemukakan bahwa dalam penelitian perlu perumusan anggapan dasar, tujuan anggapan dasar :

- Agar ada dasar berpijak yang kokoh bagi masalah yang telah diteliti.
- Untuk mempertegas variable yang menjadi pusat perhatiannya
- Guna menentukan dan merumuskan hipotesis.

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis merumuskan asumsi sebagai berikut :

- Tingkat pendidikan terhadap perilaku pemilih pada pilkada sangat berpengaruh.
- Semakin tinggi jenjang pendidikan maka pemilih pada pilkada akan semakin jeli untuk menentukan pilihannya.

2. Hipotesa

Dalam suatu penelitian diperlukan hipotesis guna memperjelas arah pengujian terhadap masalah yang diteliti. Hal ini dijelaskan oleh Sugiyono (2008:64) yaitu sebagai berikut : “Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan kedalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Dalama arti lain hipotesis merupakan suatu tekanan terhadap hubungan antara variable-variabel yang akan diteliti. Hipotesis pada umumnya berbentuk pernyataan sementara yang telah dapat diterima sebagai suatu kebenaran. Namun, pada saat selanjutnya hipotesis tersebut harus diuji kembali kebenarannya.

Adapun rancangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- A. Jika semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin selektif seseorang untuk menentukan pilihannya .
- B. Jika semakin rendah tingkat pendidikannya makan akan semakin tak peduli dengan pilihannya.